

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA WISATA DI DESA
BANJAREJO KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN**

Faridatul Mubarakah¹, Maesaroh², Nina Widowati³,

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024)7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id



ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat di Desa Banjarejo melalui pengelolaan desa wisata merupakan upaya pemerintah Desa Banjarejo dalam melestarikan peninggalan sejarah dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Pemberdayaan ini dilihat dari indikator keberhasilan pemberdayaan yaitu akses, partisipasi dan kesejahteraan pada aspek pendidikan. Aspek yang belum sesuai dengan harapan yaitu kontrol dan kesejahteraan pada aspek pendapatan dan ketenagakerjaan. Kontrol yang dilakukan pengelola desa wisata dan pemerintah desa hanya sebatas pendampingan pelatihan dan evaluasi kegiatan kegiatan, belum adanya monitoring terkait kelanjutan pelatihan. Permasalahan kurang personal branding terhadap desa wisata ini berimbas pada kesejahteraan yaitu aspek pendapatan dan aspek ketenagakerjaan. Faktor pendorong pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo yaitu sumber daya alam, sarana dan prasarana serta adanya kebijakan yang mendorong. Sementara itu, faktor penghambat pemberdayaan yaitu keterbatasan kemampuan manajerial, tidak adanya kemampuan mengelola peluang pasar yang ada dan terbatasnya modal usaha yang dimiliki. Saran yang diberikan adalah meningkatkan monitoring dan kontrol dari pihak pengelola desa wisata dan pemerintah desa untuk pasca kegiatan pelatihan, meningkatkan personal branding desa wisata, melakukan studi banding untuk meningkatkan manajerial pengelola desa wisata, serta melakukan kerjasama dengan pihak swasta sebagai penambah anggaran dan dana pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Desa Wisata, Partisipasi.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA WISATA DI DESA BANJAREJO KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN

Faridatul Mubarakah¹, Maesaroh², Nina Widowati³,

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024)7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Community empowerment in Banjarejo Village through the management of tourist villages is an effort of the Banjarejo Village government in preserving historical heritage and increasing people's income. This study aims to analyze community empowerment through tourism villages in Banjarejo Village, Gabus District, Grobogan Regency. The research method used is descriptive qualitative. Sources of data in this study obtained from interviews, observations, and documentation. The informant selection technique was carried out using purposive sampling. Empowerment is seen from the indicators of success of empowerment, namely access, participation and welfare in the aspect of education. Aspects that are not in line with expectations are control and welfare in terms of income and employment. The control carried out by the tourism village manager and village government is only limited to training assistance and evaluation of activities, there is no monitoring related to the continuation of training. The problem of lack of personal branding on this tourist village has an impact on welfare, namely the income aspect and the employment aspect. The driving factors for community empowerment through tourism villages in Banjarejo Village are natural resources, facilities and infrastructure as well as encouraging policies. Meanwhile, the inhibiting factors for empowerment are limited managerial capabilities, lack of ability to manage existing market opportunities and limited business capital owned. The advice given is to improve monitoring and control from the tourism village manager and village government for post-training activities, improve the personal branding of tourist villages, conduct comparative studies to improve the managerial management of tourist villages, and collaborate with the private sector as an addition to the budget and community empowerment funds.

Keywords: Community Empowerment, Tourism Village, Participation

PENDAHULUAN

Dunia kepariwisataan sekarang ini terdapat kecenderungan dalam pengelolaan potensi daerah, terutama bagi desa yaitu dengan strategi pemberdayaan masyarakat. Menurut (Mustangin, 2017) bahwa pemberdayaan dapat diwujudkan dengan

berbagai program, salah satunya adalah program desa wisata. Desa wisata memiliki dampak dalam segi perekonomian suatu wilayah yang di dalamnya terdiri dari pemerataan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan

pendapatan daerah (Saliman, dkk, 2019). Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek penting dalam pengembangan desa wisata (Rohim,2013). Pembentukan desa wisata juga terus dilakukan oleh beberapa daerah untuk mendorong wilayahnya agar mampu menciptakan potensi dari daerahnya, termasuk juga daerah Jawa Tengah. Hal tersebut kemudian di dukung dengan di keluarkannya Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa tengah yang merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah mengenai adanya desa wisata, sebagaimana dijelaskan bahwa desa wisata memiliki peranan yang penting dalam pemajuan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, pengoptimalisasian potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta pengangkat dan pelindung nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan penjaga kelestarian alam.

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu daerah yang mengembangkan pariwisata, karena sebagai sektor komoditi untuk menghasilkan input pendapatan daerah. Kabupaten Grobogan dengan letak geografis berbentuk lembah yang diampit oleh dua pegunungan kapur yaitu pegunungan kendeng di bagian selatan dan pegunungan kapur utara di bagian utara membuat Kabupaten Grobongan memiliki

potensi pariwisata yang menarik untuk dikembangkan, salah satu upaya yang dilakukan adalah menetapkan beberapa desa untuk dijadikan sebagai desa wisata. Desa yang ditetapkan seperti Desa Banjarejo Kecamatan Gabus dan Desa Tarub Kecamatan Tawangharjo yang merupakan desa dengan memiliki potensi destinasi wisata yang layak untuk dikembangkan.

Desa Banjarejo salah satu desa di Kabupaten Grobogan yang telah resmi menjadi desa wisata pada tahun 2016. Desa Banjarejo yang terletak di Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan adalah desa yang memiliki hasil temuan fosil hewan purbakala, benda cagar budaya dan perhiasan kerajaan, sehingga Desa Banjarejo di kenal sebagai desa wisata yang memiliki potensi alam dan budaya yang sangat besar dengan memadukan wisata sejarah purbakala dan kebudayaan, nilai-nilai budaya dan kreativitas masyarakat. Sebagai desa yang sangat tertinggal maka desa Banjarejo perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan dan sejarah Desa Banjarejo maka pemberdayaan yang lakukan di Desa Banjarejo yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wisata. Dengan anggaran alokasi dana desa yang diberikan untuk membangun tempat wisata sebanyak

Rp 170.000.000,- kemudian pemerintah Desa Banjarejo melakukan pengembangan wisata yang sudah ada dengan menambah beberapa obyek dan membangun sarana prasarana guna menunjang kenyamanan para wisatawan. Potensi wisata awal yang dimiliki Desa Banjarejo yaitu petilasan Aji Soko yang berada di Dusun Medang dan ladang bekas pengeboran minyak colonial belanda yang berada di Dusun Nginggil serta penemuan-penemuan fosil dan benda-benda purbakala. Dengan potensi yang ada kemudian kepala Desa Banjarejo menambahkan obyek-obyek wisata yaitu taman ganesha tidur, omah balung, rumah fosil, dan museum lapangan yang berada di lingkungan kantor kepala desa yang merupakan akses fisik yang diberikan pemerintah Desa Banjarejo kepada masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata diaplikasikan Desa Banjarejo melalui destinasi-destinasi wisata yang ada guna mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam pengelolaan desa wisata.

Semenjak Desa Banjarejo ditetapkan sebagai desa wisata pada tahun 2016 diperoleh data statistic dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Grobogan dimana Desa Wisata Banjarejo merupakan desa wisata yang memiliki jumlah

wisatawan yang cukup banyak. Hal ini merupakan desa wisata yang diminati dari beberapa desa wisata lainnya. Di bawah ini adalah data jumlah wisatawan di Desa Banjarejo dari Disporabudpar di Tahun 2020.

Tabel
Jumlah wisatawan di desa wisata
Banjarejo

No	Tahun	Jumlah
1.	2017	132.920 orang
2.	2018	137.792 orang
3.	2019	135.360 orang

Sumber. Data DISPORABUDPAR, 2020.

Hal ini, menunjukkan bahwa potensi Desa Wisata Banjarejo yang merupakan peninggalan sejarah tidak kalah dengan desa wisata lainnya. Banyaknya pengunjung wisatawan yang datang ke Desa Wisata Banjarejo memberikan manfaat kepada masyarakat dalam meningkatkan penghasilan. Berdasarkan jumlah pengunjung yang berkunjung ke Desa Wisata Banjarejo tidak terlepas dari peran partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Desa Wisata Banjarejo. (Data jumlah pengunjung wisatawan dilihat sebelum adanya pandemic covid-19).

Dari adanya pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata yang dilakukan oleh Desa Banjarejo sudah mampu mempekerjakan masyarakat sebanyak 91 orang. Namun demikian, pekerja desa wisata Desa Banjarejo tidak setiap hari bekerja (jumlah pekerja di desa wisata banjarejo dilihat sebelum adanya pandemic covid-19). Hal ini karena, jumlah wisatawan yang tidak menentu setiap harinya., sebagai berikut:

Tabel 1.5
Tenaga Kerja Desa Wisata Banjarejo

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Pokdarwis	15 orang
2.	Komunitas peduli fosil	15 orang
3.	Pembuat patung jerami	50 orang
4.	Penjual	7 orang
5.	Tukang parker	2 orang
6.	Penjaga karcis	2 orang

Sumber. Hasil Wawancara bapak kepala desa, Desa Banjarejo, 2020.

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo ternyata belum mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, hal ini terlihat dari masyarakat yang masih memilih bertahan dengan pekerjaannya. Masyarakat di Desa Banjarejo bermata

pencaharian sebagai petani, pedagang, karyawan swasta, wiraswasta, dan lain-lain.

Partisipasi masyarakat merupakan faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat, selain adanya dukungan dari pemerintah dan potensi yang ada, tanpa adanya partisipasi masyarakat maka pemberdayaan masyarakat tidak akan berjalan. Namun demikian, partisipasi masyarakat di Desa Banjarejo masih belum optimal dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa wisata. Selain itu akses fisik berupa lokasi yang jauh dari jangkauan jalan utama membuat desa wisata di Desa Banjarejo menjadi sedikit yang mengetahuinya.

Berangkat dari beberapa permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo. Penelitian ini melihat dari indikator-indikator keberhasilan pemberdayaan yang dinilai belum sepenuhnya berhasil dalam memberikan manfaat kepada masyarakat, serta faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan.
2. Untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan.

KERANGKA TEORI

1. Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

2. Manajemen Publik

Menurut George Terry (dalam Syafii, 2006:49) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan lainnya.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Maryani & Nainggolan, 2019:8 merupakan proses pembentukan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk melakukan proses kegiatan sosial dengan maksud untuk membenahi situasi serta kondisi diri sendiri.

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 147-152) mengatakan bahwa terdapat empat dimensi yang menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan pemberdayaan. Empat dimensi tersebut yaitu:

1. Akses. Dimensi ini terkait dengan target yang diberdayakan pada akhirnya memiliki akses akan risorsis yang diperlukannya untuk mengembangkan diri. Kesetaraan dalam mendapatkan akses ke sumber daya yang ada sangat diperlukan serta dalam mendapat manfaat yang

dihasilkan dari pemberdayaan. Tidak adanya akses berdampak pada pemberdayaan menjadi tidak terlaksana. Salah satu dampak dari tidak adanya akses yang dimiliki yaitu terjadinya kesenjangan di masyarakat.

2. Partisipasi adalah keikutsertaan dari masyarakat dalam berbagai kegiatan program pemberdayaan yang ada, sehingga masyarakat ikut berperan serta dalam setiap keputusan yang diambil.
3. Kontrol merupakan proses pengamatan atau pengawasan kegiatan secara berkelanjutan agar sesuai dengan rencana.
4. Kesejahteraan adalah tolak diukur masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar manusia.

Menurut Mardikanto (2013:188) mengatakan bahwa faktor pendorong pemberdayaan masyarakat diantaranya yaitu:

- 1) Sumber daya alam (SDA).
- 2) Sumber daya manusia (SDM).
- 3) Keadaan kelembagaan.
- 4) Sarana dan prasarana.
- 5) Kebijakan.
- 6) Organisasi dan administrasi pemberdayaan masyarakat.

Menurut Arsiyah (2009:374) menyatakan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat yaitu

hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal dalam pemberdayaan diantaranya yaitu:

- 1) Terbatasnya sumberdaya manusia.
 - 2) Tidak tersedianya bahan baku.
 - 3) Keterbatasan kemampuan manajerial.
 - 4) Tidak adanya kemampuan mengelola peluang pasar yang ada dan terbatasnya modal usaha yang dimiliki.
- Sedangkan hambatan eksternal dalam pemberdayaan masyarakat diantaranya yaitu:

- 1) Akses kelompok usaha bersama (KUB) sebagai mitra pemerintah sebagai jembatan pemerintah dengan pengusaha kurang optimal.
- 2) Belum ada pihak swasta yang memberikan bantuan modal sebagai usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat.

4. Desa Wisata

Desa wisata menurut Chafid Fandeli (dalam Sulistyadi, et al., 2019:56-57) menjabarkan desa wisata adalah suatu wilayah perdesaan yang mempromosikan keseluruhan suasana yang menggambarkan keaslian desa, baik dari sisi adat istiadat, budaya, sosial, aktifitas keseharian, struktur tata ruang desa, arsitektur bangunan, serta potensi yang dapat dibangun untuk daya tarik wisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif agar dapat menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian sesuai dengan kejadian yang terjadi di lapangan. Penelitian ini berlokasi di Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Desa Banjarejo
2. Ketua Pokdarwis Desa Banjarejo
3. Ketua PKK Desa Banjarejo
4. Pedagang di Sekitar desa wisata Banjarejo
5. Masyarakat Desa Banjarejo yang pernah terlibat dalam pemberdayaan.

PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan Masyarakat melalui Desa Wisata di Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan

1.1 Akses

Akses merupakan jalan masuk untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata bagi

masyarakat Desa Banjarejo. Tidak adanya akses dapat menjadi penghambat dalam mencapai tujuan pemberdayaan. Akses yang dimaksud terbagi menjadi 2 yaitu, akses fisik dan akses non fisik. Berdasarkan hasil penelitian, akses fisik pada pemberdayaan melalui desa wisata ini berupa kemudahan masyarakat dalam berjualan di sekitar desa wisata, kemudahan masyarakat dalam mengikuti kegiatan desa wisata dan kemudahan akses jalan menuju desa wisata banjarejo. Akses non fisik pada penelitian ini berupa minat masyarakat terhadap pelatihan pemberdayaan yang diberikan sangat tinggi, baik pelatihan yang diberikan ibu-ibu PKK, bapak-bapak maupun para remaja. Fasilitas pelatihan yang gratis mendorong masyarakat untuk mengikuti setiap pelatihan yang disediakan.

1.2 Partisipasi

Partisipasi masyarakat memiliki arti yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan serta pelaksanaan suatu kegiatan. Partisipasi dilihat dari tiga hal, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam perencanaan kegiatan, dan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan pengambilan keputusan ini dilakukan dengan cara

mengumpulkan aspirasi, usulan, serta permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat diberikan wadah untuk menyampaikan aspirasi dan usulannya yang ditampung oleh RT, RW, pengurus pokdarwis, lembaga desa, BPD, LPMD yang nantinya akan dibahas bersama-sama dalam musyawarah desa yang dilakukan dalam rapat bulanan.

Pada perencanaan kegiatan Desa Banjarejo mengadakan permusyawaratan desa untuk menyusun rencana kegiatan desa. Permusyawaratan yang diadakan dalam bentuk rapat bulanan dihadiri oleh perwakilan RT, perwakilan RW, pengurus pokdarwis, pemerintah desa, BPD, serta LPMD. Tahap terakhir adalah pelaksanaan kegiatan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo cukup tinggi. Tingkat partisipasi peserta pelatihan-pelatihan yang pernah diberikan pengelola desa wisata dan pemerintah desa terbilang tinggi, hal ini didasari karena motivasi yang kuat yaitu keinginan mendapatkan penghasilan tambahan dan menambah kreativitas.

1.3 Kontrol

Kontrol terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui

desa wisata di Desa Banjarejo dilihat melalui pendampingan dan pemantauan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan pengelola desa wisata. Berdasarkan informasi yang didapatkan saat penelitian, aspek kontrol pada pemberdayaan masyarakat di Desa Banjarejo menjadi salah satu penghambat dalam kegiatan. Menurut data yang dilakukan dilapangan, pemantauan dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pengelola desa wisata belum maksimal karena hanya berjalan ketika kegiatan berlangsung saja. Setelah kegiatan selesai tidak dilakukan pemantauan atau evaluasi kembali, sehingga hanya berhenti sampai pelatihan.

1.4 Kesejahteraan

Kesejahteraan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membahas tentang kesejahteraan masyarakat di Desa Banjarejo yang dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan pokok sandang pangan masyarakat. Pada penelitian ini suatu masyarakat bias dikatakan sejahtera apabila kebutuhan sandang panganya sudah berhasil dipenuhi dari pemberdayaan melalui desa wisata yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, kebutuhan sandang pangan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi jika

hanya mengandalkan hasil dari adanya desa wisata saja. Pendapatan dan pekerjaan yang diperoleh dari bekerja di tempat wisata tidak setiap hari ada sehingga penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan.

2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pemberdayaan di Desa Banjarejo

Faktor pendorong pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo ada tiga yaitu pertama sumberdaya alam yang melimpah. Potensi temuan fosil yang ada di Desa Banjarejo dan potensi jerami yang melimpah mendorong Desa Banjarejo sebagai desa wisata, peluang-peluang yang ada dimanfaatkan pengelola desa wisata untuk menciptakan pekerja bagi masyarakat didorong dengan pemberian pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Faktor pendorong kedua adalah sarana dan prasana yang disediakan pemerintah desa dan pengelola desa wisata untuk mendukung desa wisata agar lebih menarik. Selain itu juga mendukung terciptanya pekerjaan bagi masyarakat. Faktor ketiga yaitu kebijakan, dorong yang diberikan pemerintah melalui peraturan-peraturan yang ada menjadi salah satu faktor pendorong lahirnya

pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo ini.

Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo ada tiga yaitu Faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Banjarejo ada tiga. Faktor penghambat pertama adalah keterbatasan kemampuan manajerial. Kurangnya kemampuan manajerial yang dimiliki pengelola desa wisata dan pemerintah desa membuat pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata menjadi kurang maksimal. Faktor penghambat kedua adalah tidak adanya kemampuan mengelola peluang pasar yang ada dan terbatasnya modal usaha yang dimiliki. Masyarakat Desa Banjarejo masih belum bisa mengelola peluang pasar yang ada hal ini karena, masyarakat lebih memilih mempertahankan pekerjaan yang sudah memiliki pendapatan yang pasti. Terbatasnya modal usaha yang dimiliki juga dampak dari pendapatan masyarakat yang tidak pasti. Faktor penghambat ketiga adalah belum ada pihak swasta yang memberikan bantuan modal sebagai usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberdayaan Masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan

Pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo belum berhasil dilaksanakan karena masih terdapat beberapa aspek yang belum tercapai. Sumber daya yang ada di Desa Banjarejo memang sangat mendukung, namun kontribusi dari masyarakat masih kurang dalam kegiatan. Aspek yang hasilnya sudah sesuai antara lain akses non fisik dan partisipasi. Sedangkan aspek yang tidak mendukung yaitu akses fisik, kontrol dan kesejahteraan. Akses fisik kurang mendukung karena kemudahan untuk menuju ke lokasi desa wisata masih sulit. Kontrol berupa pemantauan dan pendampingan hanya dilakukan saat kegiatan berlangsung saja, sebelum dan setelah kegiatan tidak ada. Kesejahteraan masyarakat Desa Banjarejo terutama dalam pemenuhan sandang pangan belum bias sepenuhnya tercukupi jika hanya mengandalkan dari adanya desa wisata saja.

2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pemberdayaan di Desa Banjarejo

Faktor pendorong pemberdayaan masyarakat di Desa Banjarejo yaitu pertama sumberdaya alam yang melimpah yaitu hasil temuan fosil dan benda-benda kuno serta melimpahnya hasil jerami. Faktor kedua yaitu sarana dan prasarana, untuk mendukung berjalannya desa wisata ini pemerintah desa dan pengelola desa wisata melengkapi sarana dan prasarana seperti menambah destinasi-destinasi baru dan fasilitas umum untuk kenyamanan pengunjung. Faktor ketiga yaitu kebijakan. Peraturan yang menjadi dasar pemberdayaan diantaranya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 20 tentang desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dana desa. Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah.

Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat di Desa Banjarejo ada tiga. Faktor penghambat pertama adalah keterbatasan kemampuan manajerial. Faktor kedua yaitu tidak adanya kemampuan mengelola peluang pasar yang ada dan terbatasnya modal usaha yang dimiliki. Faktor penghambat

ketiga yaitu belum ada pihak swasta yang memberikan bantuan modal sebagai usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan pemberdayaan khususnya dalam indikator akses terutama akses fisik, indikator kontrol dan indikator kesejahteraan terutama aspek pendapatan dan aspek ketenagakerjaan perlu dilakukan:
 - a) Perlu adanya kerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan terkait transportasi umum untuk rute menuju desa wisata Banjarejo.
 - b) Peningkatan monitoring dan kontrol dari pihak pengelola desa wisata dan pemerintah desa terhadap pelatihan pemberdayaan terutama pasca kegiatan pelatihan.
 - c) Peningkatan personal branding desa wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan agar mampu mendukung pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo terutama meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Untuk meningkatkan pemberdayaan khususnya dalam menghadapi faktor penghambat perlu dilakukan :
 - a) Perlu adanya studi banding untuk meningkatkan kemampuan manajerial pengelola desa wisata dan pemerintah desa.

- b) Melakukan kerja sama dengan pihak swasta sebagai penambah anggaran dana pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Edi Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Gunawan, Sumodiningrat. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Handini, S., Sukei, & Astuti, H. K. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir* (N. Azizah, ed.). Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Keban, Yeremias T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet 4. Bandung: Alfabeta.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: alfabeta.
- Maryani, D. dan, & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sarinah dan Mardalena. (2017). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.

- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV ALFABETA.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA CV.
- Suhendra. (2006). *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyadi, Y., Eddyono, F., & Entas, D. (2019). *Pariwisata Berkelanjutan dalam Perspektif Pariwisata Budaya di Taman Hutan Raya Banten* (Fungky, ed.). Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Syafiie, Inu Kencana. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Asdi Mahasatya.
- Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. (2007). *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Yoeti, Oka A. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arsiyah. (2009). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Krupuk Ikan Di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo)*. *Jurnal Wacana* Vol. 12 No. 2 April 2009.
- Rohim, Abdur. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, DIY)*. *Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Saliman, dkk. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata: Studi Kasus di Desa Wisata Brajan, Sleman Yogyakarta*. *JIPSINDO. Jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta. Vol 6, No. 2.
- Sutawa, G. K. (2012). *Issues on Bali Tourism Development and Community Empowerment to Support Sustainable Tourism Development*. *Procedia Economics and Finance*, 4(Icsmed), 413–422. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(12\)00356-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(12)00356-5)
- Syah, Dwi Perdana. (2019). *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism)*. *Publikasi Ilmiah. Program Studi Ilmu Komunikasi. Fakultas Komunikasi dan Informatika*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah.
- Wicaksono, Krisna Ardhi. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata (Dewi) Menari Dusun Tanon Desa Ngrawan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang*. *Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi Dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Widjajanti, Kesi. (2011). *Model Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 12(1).

Sumber lain

- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Grobogan, 2021.

Badan Pusat Statistika Kabupaten Grobongan, 2018.

Badan Pusat Statistika Dinas Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata, 2020.

Data Monografi Desa Banjarejo 2021.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan, 2019.

Disporabudpar Kabupaten Grobogan, 2018.

Komunitas Informasi Masyarakat Desa Banjarejo.

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 20 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2016.

PermenDesa PDTT Nomor 17 Tahun 2019.